

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN SINJAI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH :
RISKA KARIM
10400115067
M A K A S S A R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Karim
Nim : 10400115067
Tempat, Tgl. Lahir : Sinjai, 05 mei 1998
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 28 Juni 2019

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
RISKA KARIM
NIM. 10400115067

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai” yang disusun oleh Riska Karim, NIM: 10400115067, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata,

30 Juni 2019 M
26 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekertaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.
Munaqisy I : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
Munaqisy II : St. Nurjannah, S.H., M.H.
Pembimbing I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H.
Pembimbing II: Dr. Andi Safriani, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

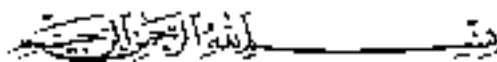
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K
Diketahui oleh:
Rektor Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN SINJAI”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salam dan salawat senantiasa di panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ummatnya dari jurang-jurang kehancuran menuju puncak kejayaan, Beliaulah yang berjuang demi satu kalimat “Laailahaillah”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Bapak Abd. Karim dan Ibu Jubaedah, orang tua tercinta penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah membesarkan dan mendidik penulis hingga dapat menempuh pendidikan yang tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Makassar. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II dan Ibu Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Hamdan Juhanis, Ph.D selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Hamsir., S.H, M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Safriani, S.H., M.H selaku pembimbing II terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H selaku penguji I dan Ibu ST. Nurjannah, S.H., M.H selaku penguji II.
6. Untuk kakak-kakak saya : Ardi, Hasbi, Irfandi, Rekawati, terima kasih telah membantu baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi

7. Saudara-saudara saya Andi Nurayatillah, Nutfadillah, Fahrunnisa, Sindi Fatika Sari, Nurul Hikmah.
8. Kakanda Muh Aswin yang selama ini memberikan banyak ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat saya Sri Ayu Ningsih, Rahmawati, Andi Ratu Bulqis, Restu Indri Lestari, Syahrini Sabir, Nur Aima.
10. Keluarga besar kelas Ilmu Hukum B yang kurang lebih 3 tahun penulis mengalami banyak kenangan bersama kalian.
11. Keluarga besar kelas konsentrasi tata negara dimana penulis belajar selama kurang lebih satu setengah tahun terima kasih atas kebersamaannya.
12. Keluarga besar kelas VONIS yang kurang lebih 3 tahun penulis mengalami banyak kenangan bersama kalian.
13. Keluarga besar Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman KKN Angkatan 60 khususnya posko 2 kelurahan Laikang kecamatan Kajang Kabupaten Blukumba.
15. Keluarga besar Kerukunan Keluarga Mahasiswa Sinjai (KKMS) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
16. Senior-senior jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu mendapat pahala di sisi Allah SWT, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Samata, 28 Juni 2019

Penyusun,

RISKA KARIM
NIM. 10400115067



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah	11
1. Pemerintah Daerah	11
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	13
3. Kewajiban Pemerintah Daerah	16
4. Otonomi Daerah	16
5. Peraturan Daerah	18
6. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah	20
7. Materi Muatan Peraturan Daerah	21
B. Lingkungan Hidup	23
1. Pengertian Lingkungan Hidup	23
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
3. Dampak Lingkungan Hidup	24
C. Wilayah Pesisir dan Masyarakat Pesisir	26
1. Wilayah Pesisir	26
2. Karakteristik Masyarakat Pesisir	28
D. Sampah dan Pengelolaannya	29
1. Pengertian Sampah	29
2. Sumber-Sumber Sampah	30
3. Jenis-jenis Sampah	31
4. Sampah Berdasarkan Sifat Fisik	32

5. Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah	33
6. Sistem Pengelolaan Sampah	34
7. Dampak Negatif Sampah	44
E. Lingkungan Hidup Menurut Konsep Islam	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN.....	50
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Lokasi Penelitian.....	50
3. Pendekatan Penelitian	50
4. Sumber Data.....	51
5. Metode Pengumpulan Data	51
6. Instrumen Penelitian.....	52
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Lokasi Penelitian	54
B. Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat Pesisir Di Kabupaten Sinjai	55
C. Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.....	63
D. Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Menunjang Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir	66
BAB V PENUTUP.....	71
1. Kesimpulan	71
2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xvi

ABSTRAK

Nama : Riska Karim

NIM : 10400115067

Judul : Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kabupaten Sinjai. Dan sub masalah yaitu, (1) Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai (2) bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (3) bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir Sinjai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*qualitative research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Data dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan sampah di wilayah pesisir Lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. (2) Pemahaman masyarakat pesisir Lappa akan perda tentang pengelolaan sampah tersebut juga sangat minim terlihat dari siakp masyarakat yang masih membuang sampah sembarang terutama di sungai. (3) peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik Karen akurangnya pemahaman akan perda tersebut dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran.

Implikasi penelitian yakni (1) Diharap kepada pemerintah lebih aktif mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah ini melihat banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui isi dari perda tersebut (2) Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan perda tersebut. (3) Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Yang pada awalnya hanya merupakan masalah alami yang dimana hanya merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat dipulihkan kemudian secara alami (*homeostasi*).

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.¹

¹N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 1.

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, bencana banjir dll.²

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kabupaten Sinjai telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Segala sesuatu yang membahas tentang pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga

²Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis “*peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)*”(Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 9.

retribusi pelayanan persampahan dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diketahui masyarakat secara keseluruhan, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 8 yang berbunyi :

Setiap orang/badan berhak :

1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah.
2. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
5. Memperoleh pembinaan agar dapat pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan

Permasalahan yang sama juga dialami di daerah pemukiman pesisir Bumi Paguntidaka kelurahan Selumit Pantai, kota Tarakan. Sampah juga merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Tarakan. Namun lingkungan di daerah tersebut masih saja terlihat kumuh dan menimbulkan bau tidak sedap disebabkan karena masyarakatnya yang masih saja melakukan pembuangan sampah sembarangan hingga menyebabkan sampah berserakan memenuhi kolong rumah warga dan disepanjang bibir pantai.

Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah tersebut juga dapat mencemari pantai dan laut Tarakan sehingga mengurangi spesies biota laut yang dapat mempengaruhi perekonomian di kawasan tersebut yang dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Tidak jauh beda dengan kota Tarakan, Di kabupaten Sinjai yakni di kelurahan Lappa dan sekitarnya juga merupakan kawasan pesisir. Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat setempat serta peran pemerintah kabupaten Sinjai terhadap permasalahan pengelolaan sampah padahal keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hal tersebut, masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.³

Begitu lengkap dan mendetail dijabarkan dalam satu peraturan daerah namun permasalahan sampah di kabupaten Sinjai masih saja belum teratasi hingga saat ini khususnya di daerah pesisir Sinjai itu sendiri yang dimana terdapat sungai Tangka sebagai pembatas antara kabupaten Sinjai dengan kabupaten Bone yang merupakan kawasan pesisir dengan populasi padat penduduk sehingga banyak menghasilkan sampah rumah tangga yang dimana sampah rumah tangga merupakan sumber penimbunan sampah terbanyak setiap bulannya. Volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas

³Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.10.

pelayanan yang disediakan pemerintah seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang sampah dimana sehingga Sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat pesisir Lappa hingga saat ini antara lain adalah pembuangan sampah secara terbuka (*open disposal/dumping*), penimbunan sampah ke dalam tanah (*sanitary landfill*), pembakaran sampah (*incinerator*)⁴ bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan seperti di lahan kosong, di sungai atau laut dengan alasan tidak adanya papan himbauan berupa informasi larangan dan sanksi. Penggunaan cara ini dipercaya dapat menekan volume sampah namun jika dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu panjang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan perairan seperti sampah berserakan dimana-mana, menimbulkan bau tidak sedap, lingkungan kotor, pencemaran tanah dan laut, penyumbatan selokan dan drainase hingga menimbulkan bencana banjir.

Penting diketahui oleh masyarakat bahwa pengurangan sampah tidak hanya berasal dari pembatasan penimbunan sampah saja tapi juga dalam hal pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Namun hingga sampai saat ini belum adanya inisiatif dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar dalam hal tersebut. Contoh kecil saja seperti pemisahan sampah organik dan anorganik yang dapat

⁴ Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 233.

menghasilkan pupuk kompos yang berguna untuk menyuburkan tanaman, ada pula pengelolaan daur ulang sampah dengan memanfaatkan kembali limbah sampah hingga menjadi suatu produk bernilai ekonomi. Padahal dalam peraturan daerah tersebut pada Pasal 8 ayat (5) telah menyebutkan bahwa masyarakat berhak memperoleh pembinaan agar dapat mengelolah sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan namun lagi-lagi peraturan tak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat yang masih minim serta peran pemerintah kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri yang tidak serius mengatasi dan mengawasi permasalahan-permasalahan pengelolaan sampah dengan baik sehingga membuat penulis tertarik meneliti dan membahas lebih dalam mengenai **Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian adalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah pesisir kab. Sinjai.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan arah yang sesuai terhadap pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting seperti :

- a. Peraturan Daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi territorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten, dan kota.
- b. Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh sang pemilik dan bersifat padat. Sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.
- c. Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- d. Lingkungan atau lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

- e. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang jika ditinjau dari garis pantai memiliki dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan pokok permasalahan yakni bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai. Maka dirumuskan beberapa sub masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir Sinjai?

D. Kajian Pustaka

Masalah yang dikaji dalam skripsi ini yakni Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Menunjang Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sinjai. Maka dalam penyusunan skripsi ini dilengkapi dengan beberapa reseferensi yang berkaitan dengan pembahasan diatas antara lain :

1. N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, buku ini membahas lengkap pokok- pokok hukum lingkungan meliputi pembahasan tentang lingkungan hidup, unsur-unsur lingkungan hidup, serta masalah-masalah dalam lingkungan hidup namun kelemahan dari buku ini adalah kurangnya pembahasan terhadap kerusakan lingkungan diakibatkan perbuatan manusia termasuk oleh persampahan.
2. Ni Komang Ayu Artiningsih dalam tesisnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dalam penelitiannya tersebut membahas tentang bagaimana peran masyarakat itu sendiri dalam pengelolaan sampah yang baik dan berbasis masyarakat serta peran pemerintah dalam memberikan pemahaman dan pelayanan pengelolaan sampah.
3. Rosita Chandrakirana dalam jurnalnya yang berjudul penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Environmental Governance* di kota Surakarta, dalam penelitian tersebut membahas tentang permasalahan lemahnya penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan serta sanksi tentang pengelolaan sampah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah masih terjadi.
4. Lilis Sulistyorini dalam jurnalnya yang berjudul pengelolaan sampah dengan cara menjadikannya kompos, dalam jurnalnya tersebut beliau membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah organik serta prosedur dan tatacara penggunaan sistem 3R (reuse, reduce, dan recycle) dalam proses pengelolaan sampah organik serta manfaatnya bagi masyarakat.

5. Peraturan Daerah Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang membahas secara detail tentang pengelolaan sampah di kabupaten Sinjai.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di daerah pesisir di kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretik

Diharapkan agar penelitian ini dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

- b. Kegunaan Praktisi

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang permasalahan pengelolaan sampah. Serta memberikan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pengelolaan sampah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti *melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh*. Dengan adanya tambahan awalan “pe-”, pada kata “pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi *badan atau organisasi yang sedang mengurus*.

Menurut Mariun, istilah “pemerintah” merujuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemerintah menunjuk kepada subyek tertentu.

Di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.⁵

⁵Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 11-12.

Berdasarkan Pasal 1 angk 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan wakil kepala daerah.⁶

Setidaknya, jika dilakukan perpaduan kata “pemerintah” sebagai subjek pemerintahan dengan kata “daerah” sebagai objek pemerintahan, maka pemerintah daerah dapat diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah administratif tertentu. Pengertian ini juga sejalan dengan diktum Pasal 1 angka (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) yang mengartikan pemerintah daerah dalam artian kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁷

Terkait dengan ruang lingkup pemerintahan daerah yang menjadi urusan dan kewajiban pemerintah daerah, Pasal 1 angka (2) Undang-Undang

⁶Andi Pangeran Moenta – Syafa’at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Rajawali Pers, 2008), h. 26.

⁷Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017),h. 12.

Pemerintahan Daerah memberikan gambaran umum tentang arti dari pemerintahan daerah, yaitu:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah wali kota.⁸

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Tugas adalah suatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.⁹ Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 65 Ayat (1) dan (2). Kepala Daerah memiliki Tugas :

Ayat (1)

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

⁸Sirajuddin. Dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang: Setara Press, 2011), h. 59.

⁹Andi Pangeran Moenta – Syafa'at Anugrah Pradana, (Depok: Rajawali Pers, 2008), h. 51.

- c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Kepala Daerah Berwenang:

Ayat (2)

- a) Mengajukan Rancangan Perda;
- b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu juga terdapat tugas dan wewenang wakil kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2), wakil kepala daerah mempunyai tugas :

Ayat (1)

- a) Membantu kepala daerah dalam:
 - 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 2. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi bagi wakil gubernur; dan
 4. Memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati / walikota;
- b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

“Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

Setelah melihat Tugas dan kewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, tentu kita dapat melihat secara jelas bagaimana suatu sistem pemerintah daerah memiliki aturan main sendiri yang dimana dimasing-masing daerah melakukan hal yang sama yang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak kalah pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang turut dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah juga mesti mendapatkan perhatian khusus, mengingat sebagai lembaga legislatif DPRD harus menjalin kerjasama yang baik kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif di daerah.¹⁰

¹⁰Ismail Iskandar, Skripsi, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 Tentang Rumah Kost*, (Makassar: Universitas Hasannudin Makassar, 2017), h. 8-9.

3. Kewajiban Pemerintah Daerah

Kewajiban adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan semata-mata oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Suatu kewajiban dapat dikatakan sebagai utang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa yang harus seseorang miliki. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berisi kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:¹¹

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah

4. Otonomi Daerah

Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin, *autos* berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan.¹² Kata “otonomi” dapat dimaknai

¹¹Andi Pangeran Moenta – Syafa’at Anugrah Pradana, (Depok: Rajawali Pers, 2008), h. 54.

¹²Victor M. Situmorang - Cormentina Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 60.

sebagai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan (*zelfwetgeving*).¹³ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Dalam konteks pemerintahan daerah, konsepsi otonomi daerah mengandung arti pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). C.W. van der Pot memaknai konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Pemerintahan otonomi berarti memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian dalam kajian otonomi daerah adalah persoalan pengalihan kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah.¹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dua pemikiran tentang konsep otonomi daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

16-17. ¹³Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h.

¹⁴Andi Pangeran Moenta – Syafa’at Anugrah Pradana, (Depok: Rajawali Pers, 2008), h. 27.

17-18. ¹⁵Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.¹⁶

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) itu telah ada sejak adanya desentralisasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi atau UUD kepada daerah-daerah otonom, sehingga meski tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan, sesungguhnya perda itu ada. Status perda dalam sistem perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konstisionalisme dan negara hukum dalam suatu Negara yang menganut Negara kesatuan (*unitary state*) yang didesentralisasi, yakni suatu negara yang dalam struktur maupun pelaksanaan pemerintahan secara vertical dipancarkan sebagian kewenangan pemerintah pusat (*spreading van bevoegheid*) kepada daerah-daerah otonom.

Kata “Peraturan Daerah” itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata atau istilah “Peraturan” dan dari kata “Daerah”. Istilah “Peraturan” berasal dari kata dasar “atur” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”.

¹⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.8.

Kata “atur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “disusun dengan baik, rapih dan tertib”. Kata “Peraturan” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah “tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur”.

Menurut Irawan Soetijo: “peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.” Selaras dengan pendapat ini, Djoko Prakoso menyatakan bahwa “Peraturan Daerah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.”

Dalam Pasal 1 butir 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menegaskan, ayat (7) :

“Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”.

Ayat (8) :

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.

Berbeda halnya dengan pengertian atau ruang lingkup Perda menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

“Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota”.

Secara umum kedua pengertian ini (perda dan produk peraturan daerah lainnya) hanya didasarkan pada lembaga yang berwenang membentuk perda maupun jenis perda, sama sekali tidak melihat apa yang menjadi isi perda sebagai elemen yang seharusnya melingkupi suatu definisi.¹⁷

6. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.

Pembentukan peraturan daerah yang sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu dikukuhkan kedudukannya sebagai kekuasaan pemerintah daerah yang bersifat mandiri. Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan peraturan daerah ini, baik perda tingkat provinsi atau maupun perda tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit

¹⁷Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 72-75.

dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.

Kerja sama lembaga legislatif dan eksekutif dalam perumusan peraturan perundang-undangan, juga terjadi dalam perumusan perda. Kepala daerah memiliki beberapa kewenangan dalam persoalan tersebut, di antaranya ialah mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, selain merumuskan dan membahas rancangan undang-undang, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang telah disahkan.¹⁸

Adapun materi muatan perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, menyangkut persoalan-persoalan, yaitu:

- a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

7. Materi Muatan Peraturan Daerah

Istilah “materi muatan” pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan dari istilah “*het onderwerp*”. Menurut Attamimi, materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan Negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁸Arief Try Dhana Jaya, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 22.

negara tersebut beserta latar belakang sejarah dan sistem pembagian kekuasaan Negara yang menentukannya.¹⁹

Materi muatan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan wujud konkrit dari pernyataan kehendak Pemerintah secara tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari konsep kekuasaan pemerintahan tentang wewenang dibidang legislatif (wewenang peraturan perundang-undangan). suatu materi muatan dapat menjadi gambaran atas langkah dan sikap pemerintah dari suatu perundang-undangan yang ada.

Mengenai materi muatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana harus memuat materi sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi dan/atau;
- e. Pemenuhan kebutuhan hidup dan masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 No. 12 Tahun 2011 tersebut, juga menyatakan bahwa:

”Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.”

¹⁹Hamzah Halim-Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Perda (suatu kajian teoritis dan pratis disertai dengan manual)*. (Jakarta: Prenada Media grup, 2010), h. 65.

Dalam mengkaji materi muatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tindak pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, diawali dengan materi muatan undang-undang, baik yang bersumber dari kewenangan legislatif maupun kewenangan pemerintahan berdasarkan delegasi, dengan pertimbangan agar kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan dapat dikaji secara sistematis.

Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan. Artinya bahwa materi yang terkandung didalam peraturan daerah merupakan suatu urusan daerah itu sendiri yang diterbitkan guna menciptakan cita-cita hukum ditengah masyarakat.²⁰

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang memengaruhi alam sendiri, kelangsungan kehidupann, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ilmu lingkungan merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu (terutama ekologi) yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan

²⁰ Ismail Iskandar, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasannudin Makassar, 2017), h. 13-14.

lingkungannya. Dengan demikian, ilmu lingkungan merupakan penjabaran dari ekologi sehingga tidak dapat dipisahkan dengan ekologi.

Dengan pemahaman ilmu lingkungan, yang ditunjang tumbuhnya etika, kearifan, dan kepedulian lingkungan bagi semua pihak, maka kualitas lingkungan hidup tidak makin rusak dan tercemar. Kualitas lingkungan yang serasi dan seimbang akan dapat dicapai hanya dengan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

2. Pengelolaan Lingkungan

Pengetahuan tentang hubungan antara jenis lingkungan ini sangat penting agar dapat menanggulangi permasalahan lingkungan secara terpadu dan tuntas contohnya saja apabila permasalahan menumpuknya sampah di kota-kota dan diselesaikan dengan mengangkut dan membuangnya di suatu lembah yang jauh dari kota sebenarnya masalah ini tidak diselesaikan akan tetapi hanya di pindahkan dan mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti pencemaran air tanah, udara, bertambahnya jumlah lalat, tikus, bau, pemandangan yang tidak nyaman dll. Hal ini terjadi akibat orang-orang tidak memahai bahwa sampah memiliki hubungan antara sampah, air, udara, benda hidup, dan sebagainya akibatnya masyarakatlah yang akan mendapat kerugian yang besar seperti gangguan kesehatan.²¹

²¹Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 37.

3. Dampak Lingkungan

Umumnya di negara-negara berkembang pengendalian dampak lingkungan sering tidak dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku pembangunan karena pemrakarsa hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa adanya pertimbangan terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi. Adapun upaya mengendalikan dampak lingkungan yang tidak dilakukan pemrakarsa antara lain disebabkan :

- a. Biaya lingkungan (*environmental cost*) yang belum dimasukkan kedalam perencanaan suatu kegiatan karena dasar pertimbangan utamanya adalah aspek ekonomi dan teknis sedangkan aspek lingkungannya belum atau kurang menjadi perhatian oleh pihak pemrakarsa akibat keadaan ini terjadilah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu proyek pembangunan menjadi beban masyarakat seharusnya biaya lingkungan merupakan bagian dari suatu proyek pembangunan
- b. Kendala teknologi dan tenaga kerja, dampak lingkungan yang paling sering terjadi akibat teknologi yang digunakan tidak tepat dan tenaga kerjanya kurang menguasai bidangnya. Dalam pengendalian dampak lingkungan, diperlukan teknologi yang ramah lingkungan serta ekonomis dan tenaga kerjanya pun harus menguasai bidang pekerjaannya. Untuk itu dalam perencanaan kegiatan pemrakarsa harus mempertimbangkan kembali jenis teknologi yang akan digunakan dan mempersiapkan tenaga kerja yang

husus mengolah lingkungan, dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai.

- c. Dampak lingkungan akan timbul setelah kegiatan berjalan cukup lama adapun beberapa dampak lingkungan (logam berat) memang baru berbahaya setelah suatu kegiatan telah beroperasi cukup lama. Akan tetapi, hal ini tidak boleh menjadi suatu alasan untuk menolehransi kelalaian pemrakarsa mengendalikan dampak tersebut seharusnya sejak dulu pemrakarsa harus sudah mengetahui jenis bahan baku, bahan penolong, proses produksi, kapasitas produksi, serta jenis dan volume limbah yang dihasilkan kegiatannya. Pengendalian dampak negatifnya juga harus dilakukan dengan benar, serius, dan sejak awal kegiatan itu beroperasi.
- d. Penerapan sanksi hukum (*law enforcement*) tidak tegas dan konsisten. Walaupun peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup telah diterbitkan dan jika penerapannya tidak tegas dan konsisten maka pemrakarsa tidak akan pernah serius melakukan pengendalian dampak lingkungan. Sanksi hukum harus diterapkan sehingga pemrakarsa akan berpikir dua kali jika kegiatannya merusak dan mencemari lingkungan.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kurang berperan. Di Negara-Negaramaju selain masyarakatnya yang patuh terhadap sanksi hukum LSM juga merupakan salah satu kekuatan penekan sehingga perusahaan jarang merusak lingkungan. Di Indonesia sejak tahun 1990an sudah banyak berdiri LSM yang telah bergerak dalam bidang lingkungan hidup LSM juga sering

menggugat perusahaan di pengadilan karena kasus pencemaran adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Jakarta, yang dikepentingkan bukan masalah menang atau kalah dipengadilan tetapi pengaruh dan “gesah” gugatan itu bagi perusahaan-perusahaan lain. Di daerah sangat diperlukan LSM-LSM yang berkualitas (vokal, objektif, dan gigih) agar pengendalian lingkungan berjalan dengan baik.²²

C. Wilayah Pesisir dan Masyarakat Pesisir

1. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses salami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Kondisi suatu wilayah pesisir erat kaitannya dengan sistem sungai dan muara di wilayah itu. Perubahan sifat sungai yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan karena proses alami maupun sebagai akibat kegiatan manusia, baik yang terjadi di hulu maupun di daerah hilir, akan memengaruhi wilayah pesisir yang bersangkutan.

²²Manik, (Cimanggis: Prenadamedia Group, 2016).h.43-44.

Untuk kepentingan pengelolaan atau untuk wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir ke arah daratan bisa sampai ke daerah hulu sungai apabila di situ terdapat kegiatan manusia yang secara nyata menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sumber daya di bagian hilir (Rochmin *et al.*). Sedangkan ke arah laut Rochmin *et al* cenderung menyesuaikan dengan batas yuridis yang berlaku di setiap propinsi.

Namun secara keseluruhan, studi mengenai pesisir pada umumnya membahas beberapa aspek, yaitu daratan, proses, deposit, habitat, dan ekosistem. Berkaitan dengan hal ini, Haslett membagi wilayah pesisir menjadi dua sub-devisi, yaitu yang pertama didasarkan pada perubahan morfologi, (*backshore, foreshore, inshore, dan offshore*), sedangkan sub-devisi lainnya didasarkan pada tipe proses gelombang yang terjadi di bagian-bagian berbeda di wilayah pesisir (*swash zone, surf zone, dan breaker zone* yang secara bersama-sama berada di *nearshoen zone*).²³

2. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena adanya perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi dimana masyarakat pesisir terutama nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih berakses terbuka (*open access*) yang menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil

²³Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, (Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 2009), h.18-20.

maksimal yang dengan demikian resiko yang dihadapi akan menjadi tinggi berbeda dengan masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa di representasikan. Akan tetapi, menurut FIRTH masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat tani dimana sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana ; eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerja sama ; sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistem ; dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.²⁴

D. Sampah dan Pengelolaannya

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh sang pemilik dan bersifat padat. Sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat maupun semi padat berupa zat organik dan anorganik yang bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi dan dibuang ke lingkungan.

²⁴Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta: Yayasan Pustidaka Obor Indonesia, 2015), h. 7-8.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan gas H₂S yang beracun bagi tubuh.
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, karet, logam dan lain-lain.
- c. Sampah berupa abu/debu hasil pembakaran bahan bakar dan sampah.
- d. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yaitu sampah B3 adalah sampah yang dikarenakan sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna sehingga dapat menyebabkan penyakit *reversible* atau *irreversible* atau penyakit yang susah pulih.
- e. Menimbulkan bahaya dimasa sekarang maupun nanti terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.²⁵

2. Sumber-Sumber Sampah

- a. Sampah dari rumah tangga.
merupakan sampah yang biasa disebut dengan istilah sampah domestik. Sampah jenis ini biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Adapun terdapat sampah yang biasa dijumpai di

²⁵Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.18-19.

negaraindustri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Dari sampah rumah tangga juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dll.

b. Sampah dari daerah komersial

Sumber utama sampah jenis ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini pula menghasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Namun khusus di pasar tradisional, banyak menghasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

c. Sampah dari perkantoran / institusi

Sampah jenis ini berasal dari sampah perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dan dari sumber ini menghasilkan sampah yang sama seperti daerah komersial non pasar.

d. Sampah dari jalan/taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, dll. Dan biasanya menghasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

e. Sampah dari industri dan rumah sakit

Yang merupakan sampah yang sejenis sampah yang dihasilkan oleh wilayah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik.²⁶

Dari berbagai macam sampah yang di uraikan diatas merupakan sebagian kecil dari sumber penimbunan sampah yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa di pisahkan oleh sampah.

3. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah dalam kehidupan masyarakat cukup beragam mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah sampah pasar, sampah pertanian dan perkebunan, sampah rumah sakit, serta sampah tempat pelayanan masyarakat lainnya. Namun berdasarkan asalnya, sampah padat di bedakan menjadi 2 (dua) yakni :

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradedasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah jenis ini mudah di urai kembali melalui proses alami. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah bahan organik terbanyak misalnya sampah dari sisa makanan, pembungkus makanan (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, kulit buah, sayuran, daun dan ranting.

²⁶ Erni Damanhuri - Tripadmi, *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), h.8.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan –bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik di bagi menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca dan keramik, sampah detergen, sampah plastik. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai kembali oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan dan sebagian lainnya bisa terurai kembali namun dalam jangka waktu yang lama.

4. Sampah Berdasarkan Sifat Fisik

Berdasarkan sifat fisiknya maka sampah dibedakan menjadi :

a. Sampah basah (*garbage*)

Sampah golongan ini merupakan sampah yang berasal dari dari sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan seperti sayur dan buah yang memiliki sifat mudah membusuk, sifat umumnya memiliki kandungan air dan mudah membusuk sehingga menimbulkan bau.

b. Sampah kering (*rubbish*)

Sampah golongan ini dibagi menjadi dua jenis, yakni :

1) Golongan sampah tidak lapuk.

Sampah jenis ini sama sekali tidak bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun, Misalnya kaca dan mika.

2) Golongan sampah tidak mudah lapuk.

Walaupun susah lapuk namun sampah golongan ini akan tetap lapuk dengan perlahan-lahan secara alami.

Sampah jenis ini dapat dipisahkan lagi antara sampah yang mudah terbakar, seperti kayu dan kertas, dan sampah tidak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kawat dan kaleng.

5. Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan suatu keputusan sebelum melakukan tindakan di masa depan. Dalam perencanaan tahapan awal yang harus dilakukan adalah proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan tersebut. Pada proses ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui inisiatif diadakannya rapat dan keaktifannya, dan ikut serta dalam memberikan pendapat, tanggapan, serta pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan program yang direncanakan.

Melalui komunikasi dan interaksi, perencanaan yang dilakukan bersama masyarakat akan membantu mengidentifikasi masalah, memahami situasi, merumuskan tujuan dan mengidentifikasi solusi bagaimana cara memecahkan masalah yang dimaksud. Dalam hal ini perencanaan merupakan aktivitas moral,

dan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agar terlihat *logik* dari perilaku manusia. Inti dari gagasan ini adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih saat pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*Reuse, reduce, Recycle*) terdapat 5 tahap pelaksanaan pekerjaan, yaitu : tahap persiapan, tahap pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, tahap uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi.²⁷

6. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik perihal kesehatan masyarakat, teknik, konservasi, ekonomi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pengolahan persampahan bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), fasilitas sosial ekonomi, dan menunjang sektor strategis.

²⁷Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.20-21.

Proses pengelolaan dalam pengolahan sampah yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Aspek-aspek yang dimaksud antara lain :

- a. Teknis operasional
- b. Hukum dan peraturan
- c. Kelembagaan
- d. Pembiayaan
- e. Peran serta masyarakat²⁸

Jika diperhatikan, konsep ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, namun juga untuk sektor lain yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima aspek tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.²⁹

- a. Aspek teknis operasional pengelolaan sampah

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan dalam kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pembuangan akhir sampah.

²⁸Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.25.

²⁹Erni Damanhuri – Tripadmi, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), h.11.

Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya mulai dari kegiatan pewadahan hingga pembuangan akhir sampah.³⁰

Lima dasar perencanaan dalam kegiatan berdasarkan teknis operasional pengelolaan sampah, antara lain :

1) Penampungan sampah

Penampungan sampah adalah proses awal dari penampungan yang berkaitan langsung dengan sumber sampah. Penampungan sampah merupakan langkah awal sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Yang bertujuan menghindari supaya sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan. Wadah yang digunakan sesuai Standart Nasional Indonesia dengan syarat tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada persyaratan bahan wadah adalah tahan air, awet, ringan, mudah diperbaiki dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

2) Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan sampai ketempat pembuangan

³⁰Indra Yones, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h.29.

sementara. teknik pengumpulan sampah pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

a) Pola individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.

b) Pola komunal

Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.³¹

Waktu terbaik dalam pengumpulan sampah pada umumnya dilakukan pada pagi atau siang hari, namun untuk tempat tertentu seperti pasar, pengumpulan sampah biasanya dilakukan pada malam hari. Untuk frekwensi sampah atau lazimnya disebut banyaknya sampah yang dikumpulkan dan diangkut perhari. Semakin besar frekwensinya maka semakin banyak sampah yang dikumpulkan per service per kapita³²

3) Pemindahan sampah

Pemindahan sampah yakni proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat

³¹Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.29.

³²Indra Yones, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h.36.

pembuangan akhir. Tempat yang biasanya digunakan dalam memindahkan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut.

4) Pengangkutan sampah

Merupakan kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Sistem pengangkutan yang diterapkan mempengaruhi keberhasilan penanganan sampah. Pengangkutan sampah yang baik adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres.

5) Pembuangan akhir sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman.

Proses pembuangan dari tempat dimana semua hasil pengangkutan sampah yang akan diolah lebih lanjut ke tempat yang telah disediakan disebut pembuangan akhir. Prinsip pembuangan akhir yakni dengan memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah. Menurut SNI tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibagi menjadi 3 (tiga) metode antara lain :

- b) *Open dumping* yaitu dengan melakukan kenimbunan atau pembuangan ke suatu tempat dengan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.
- c) *Sanitary landfill* yaitu dengan menimbun dan memadatkan sampah kemudian menutupnya dengan tanah sebagai lapisan penutup. Namun jika dilakukan terus menerus dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan pencemaran tanah.
- d) *Controlled landfill* yaitu pengalihan antara *open dumping* dan *sanitary landfill* dengan melakukan penutupan sampah menggunakan tanah ketika TPA yang telah penuh atau mencapai periode tertentu.³³

b. Aspek Hukum dan Peraturan

Aspek pengaturan berlandaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang patut diselenggarakan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang, antara lain :

- 1) Rencana induk pengelolaan sampah
- 2) Ketertiban umum mengenai penanganan sampah

³³Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.28-29.

- 3) Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- 4) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan
- 5) Besaran tarif jasa pelayanan atau restibusi
- 6) Kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kerja sama antar daerah, atau dengan pihak swasta.³⁴

Dasar hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai berupa Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) menjabarkan tentang :

- 1) Larangan
 - a) membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah
 - b) membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
 - c) membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan situ.
 - d) membuang sampah ke TPA tanpa izin.
 - e) membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
 - f) membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
 - g) mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
 - h) mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka
 - i) membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah.
 - j) membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan membuang, menumpuk, menyimpan, sampah di
 - k) jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan tempat lain sejenisnya.
 - l) membuang sampah ke hutan lindung
 - m) menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS permanen.

³⁴Erni Damanhuri – Tripadmi, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), h.11.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 Pasal 50

ayat (2) yang berbunyi :

2) Sanksi administratif

- a) Teguran
- b) Peringatan tertulis
- c) Paksaan pemerintahan uang paksa
- d) Pencabutan izin
- e) Penutupan usaha atau kegiatan.

c. Aspek Kelembagaan

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang berfokus pada prinsip teknik dan manajemen mengenai aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membina, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup pekerjaan dan tugas pokok yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo).

Menurut Syafrudin dan Priyambada, bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan katagori kota. Bentuk kelembagaan tersebut yakni antara lain :

- 1) Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk >500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa lembaga daerah atau dinas tersendiri.

- 2) Kota sedang 1 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa – 500.000 jiwa atau ibukota propinsi berupa dinas tersendiri.
- 3) Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000 jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas atau suku dinas atau UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.
- 4) Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota/kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas atau suku dinas atau UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.³⁵

d. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota dapat berjalan dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia di arahkan kepada kesistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan tersebut adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar.

³⁵Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.29.

Menurut Raharyan dan Widagdo, peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan adalah tentang mengatur antara lain:

- 1) ketertiban umum yang berkaitan dengan penanganan persampahan
 - 2) rencana induk pengelolaan sampah kota.
 - 3) bentuk lembaga organisasi pengelolaan
 - 4) tata cara penyelenggaraan pengelolaan
 - 5) tarif jasa pelayanan atau retribusi
 - 6) kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.
- e. Aspek Peran Serta Masyarakat

Semua program pengelolaan sampah yang direncanakan hanya akan sia-sia apabila tidak ada peran serta masyarakat didalamnya sebagai sumber penghasil sampah. Salah satu pendekatan masyarakat yang digunakan untuk membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat bertingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yakni dengan merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat Wibowo dan Djajawinata.

Menurut Hadi dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai :

- 1) Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan.
- 2) Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.
- 3) Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat.
- 4) Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh consensus.³⁶

7. Dampak Negatif Sampah

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat terurai dalam waktu yang lama dapat mencemari tanah. Yang dikategorikan sebagai sampah disini adalah bahan yang tidak digunakan lagi (refuse) karena telah diambil bagian utamanya dengan pengolahan sehingga tersisa bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert dkk ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu :

a. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organism dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang

³⁶Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis , Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.32.

dapat menjadi sumber penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain:

- 1) Penyakit diare, kolera, tifus disebabkan oleh virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan yang salah sehingga dapat mencemari air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) juga berpotensi menyebar dengan cepat di daerah yang pengolahan sampah kurang baik.
- 2) Penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur.
- 3) Penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Salah satunya adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing yang berasal dari pencernaan binatang ternak masuk melalui makanannya berupa makanan sisa atau sampah.³⁷
- 4) Sampah beracun yang ditularkan dengan mengonsumsi ikan yang terkontaminasi oleh raksa (Hg). Raksa berasal dari sampah berbahaya hasil produsen pabrik baterai dan akumulator yang dibuang ke sungai.³⁸
- 5) Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam sungai mengakibatkan pencemaran terhadap air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang kemudian di buang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti

h.33. ³⁷Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, (2008),

³⁸Indra Yones, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007), h.42.

metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.³⁹

b. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan sampah yang tidak benar menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk berobat kerumah sakit).⁴⁰
- 2) Pengolaan sampah yang tidak benar akan membentuk lingkungan yang tidak bersahabat bagi masyarakat seperti bau yang tidak sedap serta sampah yang bertebaran dimana-mana.
- 3) Memberikan efek negatif terhadap kepariwisataan.
- 4) Membuang sampah pada badan air dapat menimbulkan banjir, drainase tersumbat, dan efek buruk lainnya terhadap fasilitas pelayanan umum.
- 5) Pengelolaan sampah yang tidak benar juga dapat mempengaruhi infrastruktur lain, seperti tingginya biaya yang digunakan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

³⁹<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/36615487> diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 13:30 WITA.

⁴⁰Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.3.

E. Lingkungan Hidup Menurut Konsep Islam

Konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA (sumber daya alam) sesungguhnya merupakan konsep Islam yang dapat kita lihat dalam beberapa ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadistnya. Secara obyektif dan ideal islam mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Perintah-perintah Allah SWT dan anjuran-anjuran Nabi Muhammad SAW agar manusia dapat memakmurkan bumi sekaligus menghindarkan diri dari pengrusakannya.⁴¹

Islam menganjurkan kita memelihara alam dan ekosistemnya. Bila ekosistem terpelihara dan terjaga baik maka akan memenuhi fungsinya dan mencapai maksud serta tujuan penciptaannya oleh Allah SWT bagi kesejahteraan manusia dan makhluk lain pada masa sekarang dan mendatang. Tindakan manusia yang cenderung melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan yang sulit terpulihkan dan dapat dipastikan akan menuai bencana.⁴² Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Karena itu, siapapun orangnya, melakukan kerusakan hidup dianggap sebagai suatu yang tidak baik sehingga orang munafik sekalipun tidak

⁴¹Syamsul Bahri, *Humanisasi Lingkungan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 91.

⁴²Andi. Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 32.

mau dituduh telah melakukan kerusakan di muka bumi ini meskipun ia sebenarnya telah melakukan kerusakan⁴³, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 11-12 yang berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ ١١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ١٢

Terjemahnya :

Dan apabila dikatidakan kepada mereka : Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.⁴⁴

Terdapat pula dalam QS Ar-ruum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya :

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.⁴⁵

⁴³Andi. Susilawaty, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 30.

⁴⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Pustidaka Agung Harapan, 2006), h.3.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: Pustidaka Agung Harapan, 2006), h. 576.

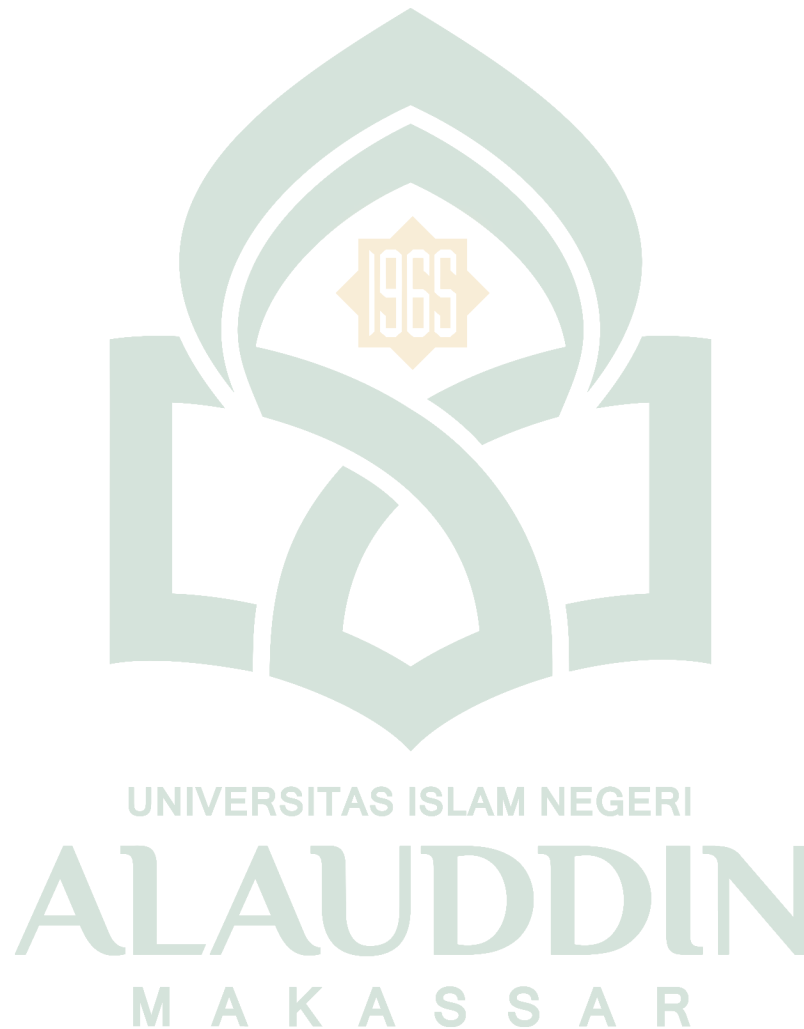
Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan sumber daya manusia yang handal, pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah SWT dan Rasul-nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kita diajarkan untuk hidup serasi dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT.⁴⁶

Lingkungan hidup adalah alam semesta ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dipahami secara utuh, karena mempunyai bagian-bagian atau komponen-komponen, yaitu: lingkungan alam (taha, air, udara, tumbuhan dan hewan), lingkungan binaan manusia (kota, desa, perkebunan, pertambakan, industri, dan semacamnya), dan lingkungan hidup sosial dimana manusia bermasyarakat.

Masyarakat harus memahami dan melaksanakan fungsi dan tugas manusia ini dengan baik. Hanya dengan demikian, maka manusia akan mewujudkan martabatnya di depa khalik-nya yaitu Allah SWT. Dengan mensyukuri rahmat

⁴⁶Andi. Susilawaty, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 4.

dan nikmat Allah SWT melalui pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian alam semesta sebagaimana mestinya membuat Allah SWT akan menambah rahmat dan nikmatnya kepada manusia dan alam semesta.⁴⁷



⁴⁷Syamsul Bahri, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 104-105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya.⁴⁸

2. Lokasi penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif maka tentunya penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di kabupaten Sinjai, terkhusus di wilayah pesisir Lappa dan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alasan bahwa selama ini penulis bertempat tinggal di lokasi tersebut sehingga mengetahui situasi dan kondisi di wilayah tersebut dan telah mengamati bahwa adanya masalah dalam hal pengelolaan sampah.

⁴⁸Sudaryono. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 91.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini model pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa Pasal-Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan (*problem*). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat substansial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data pokok. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber baik dengan masyarakat pesisir Lappa maupun dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabupaten Sinjai dan juga mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diambil dari kajian pustidaka berupa buku, jurnal dan referensi lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan cara berbicara satu sama lain antara pewawancara dengan narasumber baik dengan masyarakat pesisir Lappa maupun dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabupaten Sinjai.⁴⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengambilan gambar saat proses penelitian berlangsung. Dokumentasi biasanya berupa pengambilan data yang diperoleh dari dokumen pendukung penelitian.⁵⁰

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi, peneliti sendiri, pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data dari informan secara sistematis berupa daftar pertanyaan, buku catatan dan alat tulis untuk mencatat percakapan dan kamera yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian sebelum dicatat dalam hasil penelitian.

⁴⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.108.

⁵⁰Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.73.

7. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan

Editing merupakan kegiatan memeriksa data yang dikumpulkan, melengkapi apabila ada data yang kurang atau kosong, memperbaiki dan mengoreksi dari ketidak jelasan pencatatan data yang diperoleh dari hasil lain.

b. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses pengklasifikasian, mengkategorikan dan penyusunan, sehingga data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data menggunakan langkah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data ialah melakukan penyederhanaan, pengabstrakan, pemilahan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral.⁵¹ Data reduksi intinya mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya.⁵²

2) Penyajian data

⁵¹Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)*, (Makassar: Shofia, 2016). h. 72.

⁵²Syamsuddin, (Makassar: Shofia, 2016), h. 148.

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif, dan memudahkan untuk memaknainya.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah dilakukannya reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab akibat dari suatu fenomena atau nouma yang terjadi.⁵³



⁵³Syamsuddin, (Makassar: Shofia, 2016), h. 73.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai merupakan kabupaten pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara $5^{\circ}2'56''$ sampai $5^{\circ}21'16''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}56'30''$ sampai $120^{\circ}25'33''$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah kabupaten Sinjai adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Bone.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Bulukumba, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Gowa.

Secara administrasi kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, dan sebanyak 67 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Sinjai terletak pada arah timur dari kota Makassar dengan jarak 233 Km^2 dari kota Makassar, Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah kabupaten Sinjai tercatat sekitar 6 (enam aliran) sungai yaitu Sungai Tangka, Mangottong, Kalamisu, Bua, Lolisang, Balangtieng. Kabupaten Sinjai pada umumnya mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan September sampai dengan Maret dan musim Penghujan yang terjadi pada bulan April sampai dengan Juli.

Jumlah penduduk kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sebanyak 241.208 jiwa. Dengan kepadatan penduduk kabupaten Sinjai sebanyak 294 jiwa per km². Rasio jenis kelamin yang dimiliki kabupaten Sinjai berjumlah 94% dengan jumlah laki-laki 116.766 jiwa dan perempuan 124.442 jiwa.

Kecamatan Sinjai Utara merupakan ibukota dari kabupaten Sinjai. kecamatan terkecil kedua setelah kecamatan pulau sempilan dengan persentase luas wilayah hanya 4% dari luas wilayah kabupaten Sinjai yaitu dengan luas 29,57 km² dengan jumlah penduduk terpadat 47.091 jiwa dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 24.427 dan laki-laki sebanyak 22.664.

Kelurahan Lappa merupakan kelurahan paling timur dari kecamatan Sinjai Utara dengan luas wilayah 3.95 km² meliputi 6 (enam) lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 11.653 jiwa. Rasio jenis kelamin sebanyak 101 dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.854 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5.799 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 2.950 dengan pendapatan asli penduduk (PAD) berasal dari hasil tangkap laut yang tercatat sebanyak 2.838.341 kg atau senilai Rp.20.363.224.000 selama tahun 2017.⁵⁴

B. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Bagi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai bapak Sulkifli

⁵⁴ Website Resmi Badan Pusat Statistik Sinjai, <https://sinjaikab.bps.go.id> diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 11:00.

Bahar. Penulis menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai terkhususnya di kelurahan Lappa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut bapak Sulkifli Bahar :

“Pengelolaan yang selama ini kami terapkan pada wilayah pesisir Lappa selalu merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yakni pada Pasal 14”.⁵⁵

Penulis akan membahas sedikit pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun pengelolaan sampah berdasarkan pasal 14 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

Penanganan sampah dilakukan dengan kegiatan:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan;
5. Pemrosesan akhir sampah.

Penanganan sampah berdasarkan pasal diatas di mulai dari pemilahan sampah dengan memisahkan 5 (lima) jenis sampah yakni sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya dengan memberi tanda sesuai lebel dan warna wadah. Kemudian pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan

⁵⁵Sulkifli Bahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Wawancara, Sinjai, 11 Januari 2019.

sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS) teknik pengumpulan sampah dibagi menjadi dua yakni dengan teknik individual yang merupakan proses pengumpulan sampah yang dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA sedangkan teknik komunal yaitu teknik pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.⁵⁶ Proses pengangkutan sampah merupakan kegiatan mengangkut sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir menggunakan sarana pengangkutan sampah berupa truk kontener tertentu yang dilengkapi alat pengepres dan sejenisnya menuju tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai jadwal yang ditentukan hingga akhirnya diolah dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi. Sampah yang tidak dapat diolah dengan cara tersebut akan ditimbun dan dimusnahkan di tempat pembuangan akhir (TPA)⁵⁷. Hingga pada pemrosesan akhir sampah menggunakan metode lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan.

Itulah sedikit penjelasan tentang pengelolaan sampah yang selama ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai. Namun pada kenyataannya pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 14 ini tidak berjalan

⁵⁶ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro , 2008), h.28

⁵⁷ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang : Universitas Diponegoro , 2008), h.29

sebagaimana mestinya melihat masih banyaknya masyarakat yang tidak merasakan pelayanan pengelolaan sampah jenis ini terkhususnya di wilayah pesisir kabupaten Sinjai terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut sehingga masyarakat memilih jalan pintas dengan membuang sampah mereka di sungai atau di laut. Kendati melihat banyaknya masyarakat pesisir yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut menjadi alasan penulis untuk kemudian melanjutkan wawancara kepada beberapa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Lappa.

Ibu Diana salah satu masyarakat di Lengkong 1 mengungkapkan :

“Iye tidak ada masuk itu mobil yang ambil sampah. kalau penuhmi to langsung dibuang di sungai tidak ada juga itu tempat pembuangan sampah nasediakan disini yang biasanya di pinggir jalan kayak di pasar, jadi kalau penuh mi sampah to disitu mi dibawa jadi nda bingung ki kalau mau buang sampah”.⁵⁸

Penulis melakukan wawancara terpisah dengan Bapak A. Awaluddin H selaku anggota polisi yang menjaga posko polisi di wilayah pesisir Lengkong 1, beliau mengatakan :

“Kalau disini sampahnya kita kumpul lalu kita bawa ke pasar karena disini kita cari-cari tempat pembuangan sampah tapi tidak ada, seharusnya minimal ada tiga kayak di lelong, dekat pos polisi, dan di pantai galau karena armada pengangkut sampah tidak pernah juga masuk disini, kalau memang tidak ada mobil pengangkut sampah minimal sediakan tempat pembuangan sampah sementara supaya mudahki juga kalau mau buang sampah”.⁵⁹

⁵⁸Diana, IRT, *Wawancara*, Sinjai, 5 Januari 2019.

⁵⁹A. Awaluddin H, Polisi, *Wawancara*, Sinjai, 8 Januari 2019.

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa, pihak Dinas Lingkungan dan Kehutanan dalam hal pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut beberapa masyarakat setempat pelayanannya tidak baik. Tidak tersentuhnya pelayanan pengelolaan sampah serta tidak disediakannya sarana prasarana yang memudahkan masyarakat setempat dalam hal membuang sampah. Setelah mendengar penjelasan dari masyarakat pesisir Lappa, penulis berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberi tanggung jawab dalam hal melaksanakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah justru tidak menjalankan aturan tersebut sebagaimana semestinya padahal dengan jelas tertuang dalam Pasal 8 point (a) yang berbunyi:

Setiap orang/badan berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah

Menyadari bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan dengan baik di wilayah pesisir Lappa serta melanggar aturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 point (a), maka bapak Sulkifli Bahar selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai mengungkapkan alasan dan solusi yang akan diberikan kepada masyarakat

pesisir untuk pelayanan pengelolaan sampah yang baik di tahun 2019 ini, berikut penjelasannya :

“Sarana prasarana fasilitasnya memang kurang karena terkendala dengan anggaran. Semua bisa dilakukan jika anggaran mencukupi. Kalau armada jujur kami katakana tidak cukup, hitungannya begini pelayanan persampahan wilayah perkotaan cuman 4 kelurahan yaitu di Lappa, Biringere, Bongki, Balangnipa. Dari 638 ribu KK tenaga kerja hanya 210, sampah dari 158 KK diangkut sama satu orang, trus armada saya hanya 30 sementara ruas jalan yang ada di Sinjai 79 dan yang di kelurahan Lappa ada 32, tidak cukupki”.⁶⁰

Lebih lanjut beliau menuturkan solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019 ini :

“Solusi yang kami tawarkan untuk mengurangi sampah dengan merubah pola pikir masyarakat itu bagaimana sampah dapat bernilai ekonomis. Maka kami akan melakukan pengurangan sampah dengan cara 3R sesuai Pasal 10 sampai 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017. Saya berencana membuat Bank Sampah jadi sampah saya jemput, saya timbang lalu dicatat, hasilnya mau dijadikan sembako boleh, voucher listrik boleh, pulsa boleh. Itulah fungsi Bank Sampah mengubah sampah menjadi bernilai ekonomi mengingat juga luas lahan TPA yang kemungkinan saya punya target dua tahun kedepan akan full dan sampah kita dibawa kemana? Jadi inilah rencana yang akan kami laksanakan di tahun ini”.⁶¹

Penulis akan membahas sedikit pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 10, 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun pengelolaan sampah berdasarkan pasal 10 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1)

⁶⁰Sulkifli Bahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Wawancara*, Sinjai, 11 Januari 2019.

⁶¹Sulkifli Bahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Wawancara*, Sinjai, 11 Januari 2019.

Pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbulan sampah ;
- b. Pendaauran ulang sampah dan/atau;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Dalam melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) :

Pasal 11

Pembatasan timbulan sampah/*Reduce* :

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 12

Pendaauran ulang sampah/*Recycle* :

1. Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pendaauran ulang sampah/*Recycle* dengan:
 - a. Menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
2. Dalam melakukan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
3. Pihak lain dalam melakukan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
4. Dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 13

Pemanfaatan kembali sampah :

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah/*Reuse* dengan:

- a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat di simpukan bahwa program 3R merupakan teknik pengurangan sampah dengan cara :

1. Mengurangi (*Reduce*), melalui tindakan :
 - a. Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar
 - b. Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunaan lahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
 - c. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tissue dapat dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.
2. Menggunakan Kembali (*Reuse*), melalui tindakan :
 - a. Gunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil home industri minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.
 - b. Gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya, wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama.
3. Daur ulang (*Recycle*), melalui tindakan :
 - a. Pilih produk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.
 - b. Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreatifitas masing-masing.

- c. Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.⁶²

Setelah mendengar hasil wawancara dengan bapak Sulkifli Bahar mengenai alasan dan solusi yang akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Kabupaten Sinjai kedepannya patut kita beri apresiasi karena dengan cepat menyadari kekurangan yang terdapat dalam program pengelolaan sampah sebelumnya dengan pemberian solusi seperti ini merupakan tindakan yang cermat dan tepat.

Namun sedikit mengomentari dari solusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan kabupaten Sinjai, penulis berpendapat bahwa program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah ini lebih rumit dari yang sebelumnya seperti pemilahan sampah dengan cermat harus dilakukan sendiri oleh masyarakat, pengangkutan sampah kembali diberlakukan, serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah Dinas Lingkungan dan Kehutan kabupaten Sinjai telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Lappa mengenai 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah? hal inilah yang akan penulis bahas di rumusan masalah selanjutnya.

⁶²Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.42.

C. Pemahaman Masyarakat Pesisir Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Melirik dari pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat pesisir demi terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga dianggap penting dalam mewujudkan hal tersebut.

Dari data yang penulis dapatkan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah sangat minim. Melalui proses penelitian berupa wawancara penulis berhasil mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat yang bermukim tepat di pinggir Muara Sungai Tangka yang menurut penulis merupakan lokasi paling kumuh terlihat dari banyaknya tumpukan sampah di daerah sekitar. Penulis mulai menggali informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Bapak Ahmad salah satu masyarakat disana yang berprofesi sebagai Nelayan mengungkapkan bahwa :

“Mengenai larangan membuang sampah sembarangan iya saya tahu tapi untuk peraturan daerahnya saya tidak pernah dengar, selama ini saya buang sampah di sungai karena dimana lagi mau dibuang kalau bukan disungai? tidak ada bak sampah yang disediakan pemerintah. Pemerintah juga tidak pernah datang memberitahukan cara membuang sampah yang benar, bahkan sekedar datang melihat-lihat pun tidak pernah, kami disini hanya nelayan tidak berpendidikan jadi tidak tahu tentang hal seperti itu kalau tidak diberitahu, tidak ada juga papan himbauan kalau dilarang buang sampah di sungai jadi masyarakat tidak takut

buang sampah di sungai, apalagi tentang Bank Sampah saya tidak pernah dengar juga”⁶³

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang mahasiswa yang tinggal di daerah pesisir tersebut ketika penulis melakukan wawancara terpisah dengan saudara Faisal, beliau mengatakan :

“Masyarakat disini membuang sampah di sungai karena tidak tahu kalau sebenarnya dilarang, karena Dinas Lingkungan tidak pernah datang melakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun mengecek daerah sekitar sini, jangankan penyuluhan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) saja tidak ada. Jika memang tidak bisa secara langsung setidaknya pasang papan informasi berupa himbuan atau denda tentang larangan membuang sampah setiap seratus meter, Seharusnya kan Dinas Lingkungan kumpulkan masyarakat dan beri tahu kalau ada Undang-Undang yang melarang membuang sampah dilaut, ada dendanya juga efek negatifnya untuk laut supaya masyarakat jera dan saya yakin masyarakat pasti patuh”.

Lebih lanjut beliau menuturkan tentang pemahaman masyarakat akan keberadaan Bank Sampah :

“Saya tahu kalau ada Bank Sampah tapi kalau masyarakat disini sepertinya tidak tahu, tapi Dinas Lingkungan tidak pernah mengsosialisasikan bagaimana cara kerjanya Bank Sampah dan dimana lokasinya jadi saya rasa Bank Sampah tidak berguna. Jika disosialisasikan pasti masyarakat paham dan ikut berpartisipasi”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan masyarakat pesisir Lappa mengenai bagaimana pemahaman mereka tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tersebut sangat minim melihat respon mereka yang mengatakan “tidak tahu” atau “tidak pernah dengar” serta menyalahkan pemerintah yang tidak pernah memberitahu ataupun

⁶³ Ahmad, Nelayan, Wawancara, Sinjai, 13 Januari 2019.

⁶⁴ Faisal, Mahasiswa, Wawancara, Sinjai, 13 Januari 2019.

mengsosialisasikan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut kepada masyarakat serta tidak dipasangnya papan informasi mengenai larangan dan denda membuang sampah sembarangan sehingga masyarakat masih gemar melanggar aturan dengan membuang sampah dilaut. Padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daeran No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 8 point (c) yang berbunyi:

Setiap orang/badan berhak :

- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

Berdasarkan Pasal diatas penulis berpendapat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat pesisir Lappa sesuai dengan Peraturan Daeran Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah padahal masyarakat Lappa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan merupakan penyumbang PAD yang cukup besar untuk APBD kabupaten Sinjai terhitung dengan meningkatnya hasil tangkapan laut di TPI Lappa (tempat pelelangan ikan) setiap tahunnya. Tercatat pada tahun pada tahun 2016 mencapai 2.398.682 kg atau senilai Rp.17.040.922.000 , ditahun 2017 hasil tangkapan laut masyarakat pesisir mencapai 2.838.431 atau senilai Rp.20.363.224.000⁶⁵. Dengan peningkatan hasil tangkap laut setiap tahunnya maka meningkat pula sumbangan

⁶⁵ Website Resmi Badan Pusat Statistik Sinjai, <https://sinjaikab.bps.go.id> diakses pada tanggal 09 Juni 2019 Pukul 11:00.

PAD seharusnya mengedepankan pemberian fasilitas dan sarana prasarana di wilayah pesisir ini karena telah berjasa dalam penyumbangan APBD yang mencapai 20 miliar ditahun 2017 ini maka seharusnya ada feedback yang di dapatkan oleh masyarakat pesisir Lappa. Jika melihat kenyataanya dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Lappa justru terjadi ketidakadilan dan diskriminasi yang mereka rasakan karena tidak adanya kepedulian sama sekali dari dinas terkait seakan dianak tirikan dan tidak dianggap keberadaannya padahal jarak kelurahan ini tidak begitu jauh dari kota.

D. Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Masyarakat Pesisir.

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁶⁶

1. Peran Masyarakat

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.243.

Menjalankan Peraturan Daeran Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah memang merupakan tugas dan kewajiban bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai namun peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan merupakan hal yang tak kalah penting untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai bapak Sulkifli Bahar tentang bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemerintah menjalankan program persampahan di kabupaten Sinjai? Beliau mengatakan :

“Harusnya peran masyarakat itu sesuai dengan perda tentang pengelolaan sampah sangatlah penting. Untuk merubah pola pikir masyarakat itu sangat sulit, menumbuhkan kesadaran masyarakat sulit, tapi hal itulah yang sangat penting karena bagaimana pun kerasnya kita membersihkan wilayah tersebut jika masyarakatnya yang masih saja nakal, ya percuma.”⁶⁷

Hal yang diungkapkan oleh bapak Sulkifli sesuai dengan Peraturan Daeran Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 pada Pasal 37 ayat (3) point (a) tentang peran masyarakat, yang berbunyi:

Ayat (3)

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa :

a. Menjaga kebersihan lingkungan

⁶⁷Sulkifli Bahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Wawancara*, Sinjai, 11 Januari 2019.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang benar dan merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik merupakan salah satu peran yang sangat penting dan harus dilaksanakan masyarakat agar lingkungan tetap dalam kondisi bersih dan sehat.

2. Peran Pemerintah

Peran pemerintah tak lain adalah menjalankan tugas dan fungsinya dengan membuat program-program persampahan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai. Berikut beberapa program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai mengenai pengelolaan sampah berdasarkan hasil wawancara saya dengan pihak Dinas Lingkungan, bapak Zulkifli Bahar mengatakan:

“Kami melakukan pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan, kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, kegiatan ini berupa pengadaan 26 unit sarana pengelolaan persampahan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50 juta , kami juga melakukan sosialisasi terhadap timbulan sampah karna saya lihat warga pesisir senang menggunakan sampah sebagai dasar timbunan untuk mendirikan bangunan padahal itu tidak boleh karna dapat

merusak ekosistem, kami juga melakukan pengecekan di wilayah tersebut sebanyak dua kali sebulan”⁶⁸

Melihat program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mengenai penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebanyak 26 unit masih saja tidak tersedia di wilayah pesisir Lappa. Sosialisasi dan pengecekan yang seperti dikatakan oleh bapak kepala seksi pengelolaan sampah diatas bahkan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat disana. sehingga penulis berpendapat bahwa program kerja ini tidak merata dan tidak berjalan sesuai regulasi.

Lebih lanjut pihak Dinas Lingkungan dan Kehutan sendiri mengungkapkan bahwa alasan tidak optimalnya program pengelolaan sampah ini diakibatkan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Dari pembahasan diatas penulis berpendapat bahwa dijalankan atau tidaknya peran masyarakat berdasarkan pemahaman apa yang ditanamkan oleh pemerintah dalam hal ini dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peran pemerintah sendiri sebagai pelaksana atas segala aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat akan patuh dengan aturan apabila dinas terkait ingin menyentuh dan melakukan pemberdayaan di wilayah tersebut maka yang sangat diharapkan oleh masyarakat pesisir Lappa hanyalah

⁶⁸Sulkifli Bahar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Wawancara, Sinjai, 11 Januari 2019.

kepedulian dinas terkait untuk memberikan pelayanan persampahan yang layak agar dimudahkannya mereka untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melanggar aturan yang terdapat di perda tersebut sangat simple namun justru kenyataannya tidak dilaksanakan oleh dinas terkait dengan alasan kurangnya anggaran padahal keluaran Lappa telah menyumbangkan PAD sebesar 20 miliar dari hasil tangkapan laut selama tahun 2017 namun lagi-lagi tugas dan fungsi mereka tidak berjalan sesuai regulasi.

Menurut penulis tidak optimalnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah juga dikarenakan tidak terbangunnya kerja sama dan komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat dan berujung saling menyalahkan satu sama lain sehingga baik masyarakat maupun pemerintah tidak berjalan beriringan, masyarakat susah pemerintah pun susah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas penulis menarik kesimpulan :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan sesuai regulasi melihat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan tidak adanya sarana prasarana disediakan oleh pemerintah dan tidak tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan persampahan yang dirasakan.
2. Pemahaman masyarakat pesisir akan pengelolaan sampah yang baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 sangat minim melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan sampah yang baik sehingga mayoritas masyarakat pesisir Lappa masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam perda tersebut.
3. Tidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah berdasarkan perda tersebut yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program persampahan yang merupakan peran pemerintah di wilayah pesisir Lappa serta tidak terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara keduanya.
- 4.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan perda yang belum dikenal luas oleh masyarakat Sinjai untuk itu diperlukan sosialisasi yang masif tentang perda tersebut agar masyarakat tahu bagaimana pengelolaan sampah yang baik.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Sinjai diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. 2018. *Sinjai Dalam Angka*. Sinjai.
- Bahri, Syamsul. 2011. *Humanisasi Lingkungan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahuri, Rokhmin. Dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Damanhuri, Erni. Dan Tripadmi. 2010. *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: Pustidaka Agung Harapan.
- Jumadi. 2017. *Dasar Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manik. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cimanggis: Prenadamedia Group.
- Moenta, Andi pangeran Dan Syafa'at Anugrah P. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustidaka Obor Indonesia.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sirajuddin. Dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.

- Slamet, Juli Soemirat. 2012. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati*. Yogyakarta: Pustidaka Pelajar.
- Susilawaty, Andi. 2014. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Alauudin University Press.
- Syamsuddin. 2016. *Paradigma Metode Penelitian (kualitatif dan kuantitatif)*. Makassar: Shofia.
- Usman , Husaini. Dkk. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Artiningsih, Ni Komang Ayu. 2008. Tesis. Tidak di terbitkan. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (studi kasus di Sapang dan Jomblang, kota Semarang)*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang.
- Iskandar, Ismail. 2017. Skripsi. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2011 Tentang Rumah Kost*. Fakultas Hukum Universitas Hasannudin : Makassar.
- Chandrakirana, Rosita. 2015. Jurnal. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
- Sulistiyorini, Lilis. 2005. Jurnal. *Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos*. Universitas Airlangga : Surakarta.
- Try Dhana Jaya, Arief. 2017. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelayanan*

Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Makassar.

Yones, Indra. 2007. Tesis. Tidak di terbitkan. *Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Ranai Ibukota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau.* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro : Semarang.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Internet

<https://sinjaikab.bps.go.id> diakses pada tanggal 09 Januari 2019 Pukul 11:00 WITA.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/36615487> diakses pada tanggal 25 Januari 2019. Pukul 13:30 WITA.

RIWAYAT HIDUP



Riska Karim merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan suami-istri Abd. Karim dan Jubaedah. Penulis lahir di Sinjai pada tanggal 05 Mei 1998. Pendidikan formal pertamanya di SD Negeri 148 Lengkonge, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 3 Sinjai dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Sinjai. Setelah menamatkan sekolahnya di menengah atas penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis aktif dalam beberapa organisasi intra dan ekstra kampus antara lain : pengurus di HMJ Ilmu Hukum selama 2 periode dan menjabat sebagai ketua bidang keperempuanan, pernah menjabat sebagai ketua bidang kewirausahaan di Generasi Baru Inndonesia (GenBI), juga sebagai pengurus di organsasi daerah kabupaten Sinjai (KKMS).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R